

ABSTRAK

Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana penggelapan kendaraan ada yang tidak mengetahui bahwa perbuatan itu melanggar hukum dan ada juga yang sadar bahwa perbuatan itu melanggar hukum. Selain itu, ada beberapa orang melakukan tindak pidana karena faktor ekonomi dan lingkungan. Masalah pokok dari skripsi ini adalah lemahnya penerapan ketentuan hukum pada Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia dimana dalam hal menunjang perbaikan keadilan dalam penegakan hukum, seharusnya dalam menentukan ketentuan pidana pada Pasal 36 Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 yang mana dinyatakan sebagai *lex specialis*, setidaknya disamakan atau bahkan bisa lebih berat dibandingkan ancaman pidana yang ditentukan dalam Pasal 372 KUHP (*lex generalis*) agar memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana kejahatan penggelapan agar tidak meremehkan ancaman hukuman pada pasal khusus yang dapat memicu terjadinya tindak pidana penggelapan kendaraan *leasing*. Merujuk pada analisis putusan pengadilan terhadap kasus putusan nomor 403/Pid.B/2021/PN Blt terkait kasus penggelapan kendaraan *leasing* yang dilakukan oleh Derna Kurniawan dilaporkan pada tanggal 9 November 2021 dengan barang bukti 1 bendel BPKB (Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor) Nomor N-01090883 dengan spesifikasi mobil jenis Suzuki Ertiga Nopol AG-1195-HC Noka. MHYKZE81SHJ315474, Nosin. K14BT1249377

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Metode penelitian ini akan menitikberatkan pada pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman pembahasan masalah dan aspek-aspek sosial yang berpengaruh.

Dengan demikian, hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan Yuridis asas *lex specialis derogat legi generali* antara Pasal 36 UndangUndang Nomor 42 Tahun 1999 dan Pasal 372 KUHP dan juga ada ketentuan hukum yang akan lebih baik melakukan tinjauan ulang dalam menentukan ketentuan hukum untuk mengantisipasi hal-hal diluar kendali. Dalam penjatuhan pidana dilihat dari ancaman maksimal dari suatu penerapan pasal, fakta – fakta persidangan , pasal yang didakwakan dan berdasarkan tuntutan jaksa hakim dapat menjatuhkan suatu putusan.

Kata kunci : *Penggelapan kendaraan leasing , Asas lex specialis derogate legi generali*